



**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PURWAKARTA**

RENCANA KERJA TAHUN 2024



**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PURWAKARTA
Jl. Ir. H. Djuanda No. 11 Ciganea-Jatiluhur
Telp. (0264) 207908
sekretariatdprdkab.purwakarta@yahoo.com**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten purwakarta Tahun 2023 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2024 dapat dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Sekretariat DPRD, evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD sampai dengan tahun 2023 dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2024-2026.

Tersusunnya Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2024 ini, disamping sebagai dokumen rencana kerja, juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/ kegiatan Sekretariat DPRD.

PURWAKARTA januari 2024



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1.1. Latar Belakang.....	1
	1.2. Landasan Hukum.....	4
	1.3. Maksud Dan Tujuan.....	7
	1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	9
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023 Dan Capaian Renstra SKPD.....	9
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD	14
	2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Sekretariat DPRD.....	16
	2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	17
	2.5. Penelaahan Usulan Program.....	40
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	42
	3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	42
	3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD.....	43
	3.3. Program Dan Kegiatan.....	46
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD	60
BAB V	PENUTUP	66

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Capaian Kinerja Program Tahun 2023.....	8
Tabel 2.2	: Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD dan Pencapaian Renstra Sekretariat DPRD s/d Tahun 2021Kabupaten Purwakarta.....	9
Tabel 2.3	: Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta.....	15
Tabel 2.4	: Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun2021 Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta.....	18
Tabel 3.1	: Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta	45
Tabel 3.2	: RumusanRencana Program dan Kegiatan Tahun2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta.....	51
Tabel 4.1	: Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD Tahun 2024.....	61

BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun rancangan perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun (RKPD).

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Tahun 2024 yang disusun ini merupakan program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan yang mengacu pada rencana strategis (strategic plan report) tahun 2018-2023. Rencana strategis sebagaimana diketahui merupakan rencana umum lima tahunan yang harus diuraikan lebih lanjut ke dalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terfokus. Dengan adanya rencana kerja yang telah tersusun dengan baik diharapkan kinerja organisasi dapat semakin baik dan lebih terfokus.

Rencana pembangunan tahunan organisasi perangkat daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai rencana tahunan, Renja OPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah

Selanjutnya, setiap Perangkat Daerah (PD) sebagai pelaksana pembangunan harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD untuk jangka waktu 5 tahun. Renstra PD memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas

dan fungsi PD serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Sebagai penjabaran dari Renstra PD, maka PD membuat rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja (Renja) PD.

Rencana Kerja PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi atas dasar hal tersebut diatas dan untuk pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional , perlu sinergi perencanaan tahunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antar pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan menteri dalam negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Daerah Tahun 2024. Utamanya pada sekretariat DPRD Purwakarta, Guna Optimalisasi pelayanan dan fasilitasi terhadap tugas DPRD dalam pencapaian Sasaran dan Tujuan RKPD tahun 2021 maka Renja DPRD Akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana Kegiatan dan anggaran RKA Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta tahun anggaran 2023.

1.1.1 Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta dan Arah Kebijakan Strategis DPRD Kabupaten

Purwakarta yaitu Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Purwakarta yang mengacu pada arah pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Purwakarta tahun 2005-2025 dan memperhatikan visi misi kepala daerah terpilih yang dikampanyekan saat pemilihan umum kepala daerah, maka visi dan misi pembangunan jangka menengah periode 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Visi

“Mewujudkan Purwakarta Istimewa”

2. Misi

Untuk mencapai Visi tersebut , pemerintah kabupaten purwakarta menetapkan misi sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas pendidikan , kesehatan dan kesejahteraan social
- Meningkatnya kualitas pendidikan kesehatan dan kesejahteraan social Mewujudkan pembangunan infrastuktur dan pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan yang

berkelanjutan Mewujudkan perekonomian Rakyat Yang berbasis desa

1.1.2. Tujuan dan sasaran sekretariat DPRD

Tujuan adalah suatu cara pandang ke depan , kemana organisasi/ instansi pemerintah akan di bawa dan di arahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipasif, Inofatif serta produktif. Visi merupakan sikap mental model masa depan, dengan demikian visi harus menjadi miliki bersama dan diyakini oleh seluruh anggota organisasi, sementara itu perencanaan pada unit kerja sekretariat DPRD ditempuh melalui pembahasan dan telaahan yang melibatkan unsur bagia- bagian yang ada dalam lingkungan sekretariat DPRD

1.1.3 Tugas dan Fungsi dan struktur organisasi

Tugas dan fungsi sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta dituangkan dalam susunan organisasi yang mampu menjamin terlaksananya tugas dan fungsi secara efektif dan evesien, susunan organisasi beserta uraian tata kerja yang kompherensif menggambarkan wewenang dan tanggung jawab setiap unsur organisasi, rentang kendali dan interaksi antara pimpinan dan bawahan, serta mekanisme koordinasi internal organisasi guna menjamin kesepahaman, kesatuan arah dan keterpaduan dalam pencapaian tujuan organisasi. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Sekretariat DPRD membentuk struktur organisasi sebagai berikut:

1. Sekretaris DPRD membawahi
 - Bagian Umum terdiri atas
 - Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
 - Bagian Program dan Keuangan
 - Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
 - Jabatan Fungsional

Setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Dalam penyusunan Renja PD dilakukan pengkajian Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain, hasil evaluasi kinerja PD pada tahun sebelumnya, pencapaian target Renstra SKPD, usulan dari masyarakat/para pemangku kepentingan, serta analisis kebutuhan

penyelenggaraan tugas dan fungsi PD. Berdasarkan hal tersebut di atas maka perlu disusun Renja Tahun 2023.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 yang mendukung Visi dan Misi Bupati Purwakarta sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023.

Selanjutnya, Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2023 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2023, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2023 untuk selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja dan penyerapan anggaran.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LNRI Tahun 2004 Nomor 164, TLNRI Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (LNRI Tahun 2004 Nomor 45, TLNRI Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 139, TLNRI Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (LNRI Tahun 2006 Nomor 25, TLNRI Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (LNRI Tahun 2006 Nomor 96, TLNRI Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, TLNRI Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 21, TLNRI Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (LNRI Tahun 2016 Nomor 114);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 adalah agar tersedia dokumen perencanaan tahunan yang memuat uraian rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi, target yang akan dicapai, serta kerangka pendanaannya sesuai dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta adalah untuk menjamin konsistensi rencana teknis program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta tahun 2023 dengan Renstra 2018-2023 yang mengacu pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 serta menjadi pedoman dalam penyusunan RKA 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakartadisusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

Bab ini menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review Terhadap Rancangan RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja, serta Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab ini menguraikan tentang rencana program, kegiatan, jumlah anggaran dan indikator kinerja.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.

Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja Sekretariat DPRD dinilai berdasarkan realisasi target kinerja keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan, serta capaian dari target program dan kegiatan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022, Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta melaksanakan 2 (dua) program dan 15 (Lima Belas) kegiatan yang telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, terdapat program/kegiatan yang melebihi target kinerja, program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja dan program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja.

Data hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta yang telah dilaksanakan pada akhir tahun anggaran 2023 dan sampai dengan tahun berjalan atau triwulan III tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2024 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									

		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/semesteran SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2024 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
019	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100%	75%	75%	75%	75%			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	100%	88%	100%	88%	88%			

002	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2024 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)

024	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			
006	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Pemeliharaan Mebel	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2024(Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Pelaksanaan Medical Chek Up DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2024 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
		Penyelenggaraan kajian Perundang-undangan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
		Penyusunan Tata Tertib DPRD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan KUA dan PPAS	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan			

	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
	Pembahasan APBD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
	Pembahasan APBD Perubahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
	Pembahasan Laporan Semester	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan			

2.1. Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023

Memperhatikan pelaksanaan rencana kerja sebagaimana tergambar dari realisasi Anggaran pada Program dan Kegiatan sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta tahun 2021 Sejak Bulan Januari samapai dengan September 2021 dari 2 Program yang di tetapkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2018-2023 belum ada satu program pun yang mencapai target 100%, Kecuali hanya ada 7 Kegiatan dari 14 kegiatan yang ditetapkan, secara keseluruhan capaian atas program dan Kegiatan Terealisasi sebesar Rp. 76.391.442.024 Dari total anggaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebesar Rp. 69.475.138.277 Atau terelisasi 90.94%. ini berarti realisasi pencapaian target kinerja yang direncanakan masih belum mencapai target sebagaimana telah ditetapkan dalam renstra 2018-2023

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Program Tahun 2023

No.	Program	Target	Realisasi	Capaian
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.983.300	21.640.500	69.84%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.032.409.787	3.981.235.311	56.61%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.115.652.000	655.595.956	58.76%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.492.713.100	2.808.104.212	112.65%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	1.173.296.200	980.713.600	83.57%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah	3.146.590.304	1.601.661.913	50.90%
7	Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	882.700.000	717.995.020	81.34%
8	layanan Keuangan dan kesejahteraan DPRD	31.666.606.618	20.201.476.549	63.79%
9	Layanan Administrasi DPRD	495.000.000	408.930.000	82.61%
10	pembentukan Peraturan daerah dan Peraturan DPRD	7.136.618.300	3.767.658.513	52.79%
11	pembahasan Kebijakan Anggaran	1.423.353.350	374.953.830	26.34%
12	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	486.020.000	154.100.000	31.70%
13	Peningkatan Kapasitas DPRD	3.774.559.600	2.762.417.223	73.18%

14	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	4.423.692.900	2.181.006.450	49.30%
15	Fasilitasi Tugas DPRD	9.575.154.150	5.613.213.332	49.30%

1. Capaian tertinggi program Pelayanan Administrasi perkantoran sesungguhnya pada Penyediaan Jasa Surat menyurat, yaitu sebesar 100%. Sedangkan capaian kegiatan paling rendah Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya yaitu sebesar 39.68%.
2. Capaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, masih dibawah target Renstra Tahun 2023 yang ditetapkan 100% atau hanya terealisasi 83,12% dengan rincian kegiatan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase Capaian
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.539.100	11.165.000	82.46%
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.444.200	10.475.500	60.05%
3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.835.062.287	3.885.627.311	56.85%
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan /Semesteran SKPD	197.347.500	95.608.000	84.45%
5.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	329.000.000	216.840.000	65.90%
6.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi	486.652.000	366.915.956	75.40%
7.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300.000.000	198.660.000	66.22%
8.	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.832.000	35.560.000	99.24%
9.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.346.575.350	1.291.671.000	95.92%
10.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.672.312.500	1.321.293.000	79.00%
11.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	86.500.000	86.100.000	99.53%
12.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	85.120.000	73.480.212	86.33%
13.	Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya	1.173.296.200	980.713.600	83.57%
14.	Penyediaan Jasa Surat	6.000.000	6.000.000	100%

	menyurat			
15.	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	350.135.000	259.724.893	74.17%
16.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.790.455.304	1.335.937.020	47.86%
17.	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	232.700.000	129.206.020	55.52%
18.	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	100.000.000	39.686.000	39.68%
19.	Pemeliharaan Rehabilitasi sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	550.000.000	549.103.000	99.84%
20.	Penyelenggaraan administrasi Keuangan DPRD	31.156.606.618	19.810.651.549	63.58%
21.	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	450.000.000	331.425.000	73.65%
22.	Pelaksanaan Medical Chek Up DPRD	60.000.000	59.400.000	99%
23.	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	495.000.000	408.930.000	82.61%

Tabel 2.3

Capaian Program dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase Capaian
1.	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	485.841.250	396.459.560	81.60%
2.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	5.385.497.100	4.417.952.052	81.62%
3.	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	473.977.450	371.565.200	78.39%
4.	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan atau Naskah Akademik	791.302.500	771.350.300	97,48%
5.	Pembahasan KUA Dan PPAS	717.745.750	611.558.010	85,21%
6.	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	238.981.150	204.596.657	85.61%
7.	Pembahasan APBD Perubahan	453.248.250	0	0
8.	Pembahasan Laporan Semester	252.397.000	194.967.530	77,25%
9.	Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD	229.926.200	229.918.000	99,00%
10.	Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Pemerintaha dan Hukum	121.505.000	72.914.500	60,01%
11.	Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	121.505.000	76.931.500	63,32%
12.	Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang	121.505.000	70.796.500	58,27%

	Kesejahteraan Rakyat			
13.	Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	121.505.000	63.396.200	52,18%
14.	Pendalaman Tugas DPRD	1.812.350.000	1.670.502.035	92,17%
15.	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1.244.150.000	1.161.782.000	93,38%
16.	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	432.456.600	432.000.000	99,89%
17.	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	509.103.000	504.000.000	99,00%
18.	Pelaksanaan Reses	4.423.692.900	4.311.222.900	97,46%
19.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	6.409.904.900	5.200.192.447	81,13%
20.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	946.145.150	941.025.533	99,46%
21.	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	2.219.104.100	2.057.608.903	92,72%

1. Capaian tertinggi Program Penunjang urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota ada pada Sub kegiatan Pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya, Yaitu Sebesar 99,84%
2. Capaian Kegiatan Terendah ada Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan kabupaten kota ada pada sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan mesin lainya yaitu sebesar 39,68%
3. Capaian tertinggi pada Program dukungan pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD ada pada sub kegiatan Penyediaan Kelompok pakar dan tim ahli dengan capaian yaitu 99,89%
4. Capaian terendah pada program Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD ada pada sub kegiatan Pembahasan APBD Perubahan dengan capaian sebesar 0%.

Terkait dengan capaian program yang dilaksanakan Sekretariat DPRD kabupaten Purwakarta dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD masih banyak yang harus ditingkatkan sesuai dengan target dan sasaran yang telah di tetapkan

2.1.2 Faktor - faktor penyebab tidak tercapaian target

Beberapa penyebab tidak tercapainya target atas pelaksanaan program/kegiatan, diantaranya adalah :

1. Tidak terlaksananya APBD Perubahan Tahun 2023
2. Efisieansi penggunaan anggaran dan hasil negoisasi melalui proses pengadaan barang dan jasa
3. Pelaksanaan kegiatan sekretariat DPRD dan fasilitasi yang dlaksanakan sangat tergantung dengan agenda pimpinan dan anggota dewan hasil

saran pertimbangan yang di sepakati oleh badan musyawarah DPRD, sehingga dinamika kegiatan dewan yang sangat cepat dan dapat ditambah sering kali terjadi perubahan agenda kegiatan Dewan sewaktu waktu

4. Masih kurangnya jumlah sumber daya manusia/pegawai terutama di jajaran para pelaksana yang berkompeten dan ahli dalam bidangnya termasuk masih lemah dan belum di pahami nya sistem pengelolaan keuangan oleh para pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK);
5. Pelaksanaan kegiatan yang sangat hati- hati dan masih adanya keraguan yang muncul dalam pengelolaan kegiatan
6. Mutasi pegawai dan pergatian pucuk kepemimpinan yang terjadi ditengan tengah tahun berjalan dan memunculkan persepsi kebijaka baru
7. Target capaian program/kegiatan yang ada dalam renstra masih kurang tepat dan perlu dilakukan perbaikan kedepannya. Seharusnya target yang di maksud dap Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD.

Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2008 mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas, pokok, fungsi sebagai fasilitator kesekretariatan kedewanan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 adalah Meningkatkan Kualitas Tata Kerja Sekretariat DPRD. Oleh karena itu, Sekretariat DPRD selaku fasilitator kegiatan kedewanan di lingkup Pemerintah Kabupaten purwakarta harus mampu menjadi institusi pelayananan yang profesional, netral dan berwibawa dalam upaya menjawab berbagai perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan partisipatif dengan menerapkan prinsip keterbukaan dan keadilan
Dari tujuan yang telah ditetapkan, sasaran yang ingin diwujudkan sebagai berikut:

Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD;

- Meningkatkan pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada Dewan;

- Meningkatnya akuntabilitas dan kapabilitas Aparatur Sekretariat DPRD.
- Adapun indikator dari sasaran tersebut adalah sebagai berikut:
- Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- Persentase Aspirasi Masyarakat yang Ditindaklanjuti
- Nilai LAKIP
- Persentase BMD dalam Keadaan Baik.

2.2 Analisis kinerja Pelayanan

Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi misi kepala daerah, pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, dari suatu penilaian sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil manfaat dan dampak dengan kat lain, pengukuran kinerja didahului dengan tahapan penetapan indikator kinerja dengan pengertian sebagai berikut:

1. Masukan input adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output
2. keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan program berdasarkan masukan yang digunakan
3. hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah
4. Manfaat (Benefit) adalah kegunaan suatu keluaran yang dirasakan langsung oleh masyarakat
5. Dampak adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian indikator dalam suatu kegiatan.

Tabel 2.3 (T-C.30)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD			100%	100%	100%	100%	93,10%	100%	100%	100%	
2	Persentase Aspirasi Masyarakat yang Ditindaklanjuti			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Nilai AKIP			65	65	70	70	59,37	62,21	65	67,5	
4	Persentase BMD dalam Kondisi Baik			80%	80%	80%	80%	98,50%	92,34%	95%	98%	

Secara umum tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta sebagai fasilitator kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD telah berfungsi dengan baik, yang terlihat dari hasil capaian kinerja penyelenggaraan seluruh kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sampai dengan Tahun 2023, Sekretariat DPRD dihadapkan pada berbagai permasalahan, antara lain sebagai berikut :

1. Terdapat kegiatan yang belum optimal realiasi capaian kinerjanya, dikarenakan adanya perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan yang diakibatkan Kejadian Luar Biasa (KLB) Covid-19.
2. Capaian kinerja lebih rendah daripada realisasi anggaran dikarenakan terdapat beberapa kegiatan yang sudah ada realisasi anggarannya namun kinerjanya belum tercapai penuh.

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelaksanaan renja Tahun 2023, maka solusi yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan secara optimal berdasarkan jadwal yang sudah ditetapkan dan sesuai dengan alokasi anggaran dalam DPA dengan memperhatikan realisasi kinerja ditengah pandemi Covid- 19;
2. Mengalokasikan anggaran dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan tepat pada DPA sesuai dengan skala prioritas, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal.

Adapun isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta antara lain:

1. Pemahaman yang berbeda antara Sekretariat dan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan yang digunakan;
2. Banyak kegiatan yang terfokus di akhir tahun anggaran, menjadikan kegiatan tidak tertata dan terprogram sesuai mekanisme anggaran yang ada;
3. Jumlah penyerapan anggaran yang sangat dipengaruhi oleh kinerja kegiatan dan ketersediaan dana cash budget dalam SIMDA;
4. Banyak aspirasi yang masuk ke lembaga DPRD yang harus dipertimbangkan dalam menentukan arah kebijakan.

Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD, ikut mewarnai dalam kelancaran pengambilan keputusan.

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah disetujui di dalam pelaksanaan

APBD tahun 2021, beberapa usulan yang diajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan.

Berdasarkan rancangan awal RKPD tahun 2024, Sekretariat DPRD melakukan analisis terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Analisis yang dilakukan merupakan estimasi volume kegiatan dan dana yang dibutuhkan. Analisis kebutuhan diperlukan sebagai langkah antisipasi agar program dan kegiatan yang direncanakan dapat terakomodir seluruhnya dalam dokumen RKPD baik jumlah program/kegiatan, volume, maupun dana yang dibutuhkan.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.4 (T-C.31)

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (RP)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4	02				SEKRETARIAT DPRD									
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH									
4	02	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai AKIP PD	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang Diselesaikan Tepat Waktu	Tersedianya dokumentasi sesuai dengan pedoman yang berlaku	Kecamatan Jatiluhur, Ciganea	70 Point	24 Dokumen	24 Dokumen	13.539.100	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Khusus
4	2	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD	Nilai AKIP PD	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja yang Diselesaikan Tepat Waktu	Tersedianya dokumentasi sesuai dengan pedoman yang berlaku	Kecamatan Jatiluhur, Ciganea	70 Point	24 Dokumen	24 Dokumen	17.444.200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Khusus

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (RP)	Sumber Dana	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
4	2	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
4	2	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai AKIP PD	Jumlah Pembayaran Gaji ASN	Tersedianya dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Kecamatan Jatiluhur, Ciganea	70 Point	12 Bulan	39 Laporan	6.835.062.287	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus
4	2	1	2,02	2	Koordinasi dan Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Nilai AKIP PD	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Sekretariat DPRD	70 Point	35 Dokumen	39 Laporan	197.347.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus
4	2	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
4	2	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Nilai AKIP PD	Jumlah Laporan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Tersedianya dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Sekretariat DPRD	70 Point	1 Laporan	39 Laporan	329.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus
4	2	1	2,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai AKIP PD	Jumlah Laporan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Sekretariat DPRD	70 Point	2 Laporan	39 Laporan	486.652.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus

4	2	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai AKIP PD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Sekretariat DPRD	70 Point	1 Laporan	39 Laporan	300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus
---	---	---	------	----	--	---------------	--	---	------------------	----------	-----------	------------	-------------	--

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (RP)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
4	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
4	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Sekretariat DPRD				35.832.000	
4	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Waktu		Sekretariat DPRD					
4	2	1	2.06	4	Penyediaan bahan logistik kantor	Nilai AKIP PD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Diselesaikan tepat waktu	Tersedianya dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Sekretariat DPRD	70 Point	2 Laporan	39 Laporan	1.672.312.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus

4	2	1	2,06	5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Nilai AKIP PD	Jumlah Penerimaan Surat Masuk dan Pembuatan Surat Keluar	Tersedianya Operasional Perkantoran	Sekretariat DPRD	70 Point	450 Surat	12 Bulan	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus
4	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai AKIP PD	Jumlah Bulan Pembayaran Jasa Layanan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Operasional Perkantoran	Sekretariat DPRD	70 Point	12 Bulan	12 Bulan	306.140.815,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (RP)	Sumber Dana	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
4	2	1	2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
4	2	1	2,07	6	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Nilai AKIP PD	Jumlah Bulan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Tersedianya Operasional Perkantoran	Sekretariat DPRD	70 Point	12 Bulan	12 Bulan	1.173.296.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus
4	2	1	2,08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah										

4	2	1	2,08	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Nilai AKIP PD	Jumlah Bulan Pembayaran Jasa Kebersihan Kantor (Meliputi Penyediaan Alat Kebersihan)	Tersedianya Operasional Perkantoran	Sekretariat DPRD	70 Point	12 Bulan	12 Bulan	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus
4	2	1	2,08	2	Pemnyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Nilai AKIP PD	Jumlah Jenis Peralatan Kerja yang Diservis/Diperbaiki	Tersedianya Operasional Perkantoran	Sekretariat DPRD	70 Point	11 Jenis	12 Bulan	350.135.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus
4	2	1	2,08	4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantnror	Nilai AKIP PD	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	Tersedianya Operasional Perkantoran	Sekretariat DPRD	70 Point	75 Jenis	12 Bulan	2.790.455.304,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus
4	2	1	2,09		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah									
4	2	1	2,09	1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Nilai AKIP PD	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Dibeli	Tersedianya Operasional Perkantoran	Sekretariat DPRD	70 Point	20 Jenis	12 Bulan	232.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (RP)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
4	2	1	2,09	6	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Nilai AKIP PD	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dibeli	Tersedianya Operasional Perkantoran	Sekretariat DPRD	70 Point	14 Jenis	12 Bulan	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus
4	2	1	2,09	11	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Nilai AKIP PD	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Dibeli	Tersedianya Operasional Perkantoran	Sekretariat DPRD	70 Point	28 Jenis	12 Bulan	550.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus
4	2	1	2,15		Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD									
4	2	1	2,15	1	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD									
4	2	1	2,03	2	Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD	Nilai AKIP PD	Jumlah Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya Operasional Perkantoran	Sekretariat DPRD	70 Point	2 Kegiatan	12 Bulan	450.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus
4	2	1	2,03	3	Pelaksanaan medical check up DPRD	Nilai AKIP PD	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dibeli	Tersedianya Operasional Perkantoran	Sekretariat DPRD	70 Point	4 unit	12 Bulan		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (RP)	Sumber Dana	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
4	2	1	2,16		Layanan administrasi DPRD									
4	2	1	2,16	3	Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	Nilai AKIP PD	Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang Dibeli	Tersedianya Operasional Perkantoran	Sekretariat DPRD	70 Point	1 Jenis	12 Bulan	495.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus
4	2	2	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD									
4	2	2	2.01	1	Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	Nilai AKIP PD	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara Secara Rutin/Berkala	Tersedianya Operasional Perkantoran	Sekretariat DPRD	100%		12 Bulan	485.841.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus
4	2	2	2.01	2	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Nilai AKIP PD	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara Secara Rutin/Berkala	Tersedianya Operasional Perkantoran	Sekretariat DPRD	100%	Lapran Kegiatan	12 Bulan	5.385.497.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus

4	2	2	2.01	3	Penyelenggaraan perundang-undangan	Nilai AKIP PD	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara Secara Rutin/Berkala	Tersedianya Operasional Perkantoran	Sekretariat DPRD	100%	Laporan Kegiatan	12 Bulan	473.977.450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus
---	---	---	------	---	------------------------------------	---------------	---	-------------------------------------	------------------	------	------------------	----------	-------------	--

4	2	2	2.01	4	Fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau naskah akademik	Nilai AKIP PD	Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang Dipelihara secara Berkala	Tersedianya Operasional Perkantoran	Sekretariat DPRD	100%	5 Jenis	12 Bulan	791.302.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus
4	2	1	2,02		Pembahasan kebijakan anggaran									
4	2	1	2,02	1	Pembahasan KUA dan PPAS	Nilai AKIP PD	Jumlah Mobil Jabatan yang Direhabilitasi	Tersedianya Operasional Perkantoran	Sekretariat DPRD	100%	Kegiatan	12 Bulan	248.800.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus
4	2	1	2,02	2	Pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS	Nilai AKIP PD	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Direhabilitasi	Tersedianya Operasional Perkantoran	Sekretariat DPRD	100%	Kegiatan	12 Bulan	238.981.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus

4	2	1	2,02	4	Pembahasan APBD perubahan	Nilai AKIP PD	Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang Dibeli	Terpenuhinya rata-rata Capaian SKP ASN diatas >=80%	Sekretariat DPRD	100%	Kegiatan	12 Bulan	453.248.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus
4	2	1	2,02	6	Pembahasan penanggung jawaban APBD	Nilai AKIP PD	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan	Terpenuhinya rata-rata Capaian SKP ASN diatas >=80%	Sekretariat DPRD	100%		12 Bulan	229.925.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus

4	2	1	2,04	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan										
4	2	1	2,03	1	Pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum	Nilai AKIP PD	Jumlah Pakaian Hari-hari Tertentu	Terpenuhinya rata-rata Capaian SKP ASN diatas >=80%	Sekretariat DPRD	100%		12 Bulan	121.505.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus
4	2	1	2,03	10	Pengawasan urusan pemerintahan bidang insfaraktuktur	Nilai AKIP PD	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya rata-rata Capaian SKP ASN diatas >=80%	Sekretariat DPRD	100%	Kegiatan	12 Bulan	121.505.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus
4	2	1	2,04	11	Pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahtraan rakyat	Nilai AKIP PD	Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya rata-rata Capaian SKP ASN diatas >=80%	Sekretariat DPRD	100%	kegiatan	12 Bulan	121.505.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus

4	2	2	2,01	1	Pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian	Persentase Tersedianya Dukungan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Dokumen Administrasi, Ketatausahaan Dan Kepegawaian DPRD	Terpenuhiya Administrasi DPRD	Sekretariat DPRD	100%	Kegiatan	12 Bulan	121.505.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	2	2	2,01	2	Peningkatan kapasitas DPRD				Sekretariat DPRD					

4	2	2	2,01	6	Pendalaman tugas DPRD	Persentase Tersedianya Dukungan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase Tersedianya Dukungan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD	Terpenuhiya Administrasi DPRD	Sekretariat DPRD	100%	Dokumen	1 Tahun	1.812.390.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	2	1	2,02	1	Publikasi dan dokumentasi dewan	Persentase Tersedianya Dukungan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Terpenuhiya Kesejahteraan DPRD	Sekretariat DPRD	100%	275 Stel	1 Tahun	617.980.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

4	2	1	2,02	3	Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli	Persentase Tersedianya Dukungan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti Medical Check Up	Terpenuhinya Kesejahteraan DPRD	Kecamatan Jatiluhur, Ciganea	100%	55 Orang	1 Tahun	102.850.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
---	---	---	------	---	--	---	--	---------------------------------	------------------------------	------	----------	---------	----------------	------------------------------

4	2	3	2,01	1	Penyediaan tenaga ahlin fraksi	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terselenggaranya Penataan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Jatiluhur, Ciganea	7 orang	Laporan	#####	7 orang	Kecamatan Jatiluhur, Ciganea
4	2	3	2,01	2	Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat									Kecamatan Jatiluhur, Ciganea
4	2	3	2,01	3	Pelaksanaan ases	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan yang Diselenggarakan	Terselenggaranya Penataan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Jatiluhur, Ciganea	Kecamatan Jatiluhur, Ciganea	Kecamatan Jatiluhur, Ciganea	Kecamatan Jatiluhur, Ciganea	Kecamatan Jatiluhur, Ciganea	Kecamatan Jatiluhur, Ciganea

4	2	3	2,0 1	4	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Dokumen Naskah Akademik yang Disusun	Terselenggaranya Penataan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Jatiluhur, Ciganea	100%	Dokumen Kegiatan	12 bulan	8.409.904.900	Kecamatan Jatiluhur, Ciganea
4	2	3	2,0 2	1	fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tugas badan musyawarah	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Ditetapkan	Terlaksananya Pemenuhan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kecamatan Jatiluhur, Ciganea	100%	Dokumen	1 Tahun	946.145.150	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	2	3	2,0 2	2	Fasilitasi tugas pimpinan DPRD	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Dokumen KUPA dan PPAS Perubahan yang Ditetapkan	Terlaksananya Pemenuhan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kecamatan Jatiluhur, Ciganea	95%	Dokumen	1 Tahun	2.219.104.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional, maka SKPD menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses partisipatif, proses bottom-up dan top down. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Realisasi usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) diusahakan dapat tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Musrenbang ini merupakan salah satu wahana yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses perencanaan pembangunan, yaitu bersama-sama pemerintah membuat konsep, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memelihara hasil pembangunan sesuai prinsip-prinsip pembangunan partisipatif. Diharapkan dengan adanya pelaksanaan musrenbang diperoleh usulan kegiatan pembangunan yang berkualitas dimana realisasi kebutuhan masyarakat benar-benar memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tahapan-tahapan musrenbang sendiri meliputi Musrenbang Tingkat RT/RW, Musrenbang Tingkat Kelurahan/Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Forum PD serta Musrenbang Tingkat Kota/Kabupaten. Pada tahap Forum PD, usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat akan disinkronkan dengan usulan masing-masing PD terkait.

Selanjutnya dari semua usulan program/kegiatan hasil musrenbang tersebut dipilih dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, Renstra serta isu-isu strategis yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil usulan musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun Renja PD yang nantinya Renja tersebut dibahas dalam forum PD yang dikoordinasi oleh Bappeda. Tujuan dari pembahasan Renja adalah sinkronisasi dan penyesuaian program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi

pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi maupun daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Pada tahun 2023 tidak terdapat usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan atau dari masyarakat Kabupaten Purwakarta untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta

No	Usulan Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran
	NIHIL	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Indonesia memiliki modal dan potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, letak geografis yang strategis, struktur demografi penduduk yang ideal, keragaman budaya dan sumber daya manusia yang memiliki potensi dan kreativitas yang tidak terbatas. Hal tersebut merupakan dasar untuk mewujudkan sasaran pembangunan nasional yang tercantum dalam Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi, antara lain :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran dan target pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2020-2024, Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam RPJMD Tahun 2018-2023 telah menetapkan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang menjadi rujukan dalam melaksanakan pembangunan Kabupaten Purwakarta.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 80 Tahun 2019 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat DPRD

Kabupaten Purwakarta mempunyai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang memiliki peran penting untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Purwakarta.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
5. Pelaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD yang berjalan dengan baik akan berdampak pada perwujudan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta.

□ Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD mempunyai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang memiliki peran penting untuk dapat mewujudkan visi Mewujudkan Purwakarta Istimewa dan misi Kabupaten Purwakarta . Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Purwakarta, Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta menentukan tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat DPRD. Pada RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, Sekretariat DPRD merupakan salah satu perangkat daerah yang melaksanakan Misi ke-5 (lima), yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih. Adapun Tujuan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta sesuai dengan misi Kabupaten Purwakarta tersebut adalah “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif”.

Dengan tujuan tersebut Sekretariat DPRD diharapkan mampu memberikan fasilitasi terhadap peningkatan kinerja DPRD Kabupaten Purwakarta dalam

melaksanakan tri fungsi DPRD yaitu Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan.

Berdasarkan tujuan strategis tersebut di atas, maka sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 yang ingin dicapai adalah Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintah umum yang baik dan Efektif

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan efektif	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum baik dan Efektif	Capaian Sakip PD Persentase Fasilitasi Kegiatan Rapat DPRD
		Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran
		Persentase Penyusunan Risalah Rapat
		Persentase Referensi Perundang-Undangan

3.1 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan atau kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan suatu hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi yang konkrit untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pembangunan Kabupaten Purwakarta, maka pada Tahun 2021 Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta melaksanakan 2 program, 15 kegiatan dan 67 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 76.391.422.024,- dengan rincian sebagai berikut: program/kegiatan penunjang urusan Pemerintah/kota Rp.48.879.578.724 dan Prpgram/Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Rp 27.511.843.300

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

A. Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah

- ✓ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- ✓ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisiar realisasi Kinerja SKPD

B. Administrasi Keuangan

- ✓ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- ✓ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- ✓ Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut Kelengkapannya
- ✓ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- ✓ Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

D. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- ✓ Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- ✓ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- ✓ Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- ✓ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- ✓ Penyelenggaraann Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- ✓ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- ✓ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- ✓ Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah
- ✓ Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- ✓ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
- ✓ Penyediaan jasa pelayanan Umum kantor
- ✓ Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
- ✓ Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan jabatan
- ✓ Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya
- ✓ Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya

E. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

- ✓ Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
- ✓ Penyediaan Pakaian dinas dan atribut DPRD
- ✓ Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

F. Layanan Administrasi DPRD

- ✓ Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- ✓ Program dukungan Pelaksanaan dan Fungsi DPRD
- ✓ Pembentukan peraturan daerah dan DPRD
- ✓ Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
- ✓ Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
- ✓ Penyelenggaran kajian Perundang- Undangan
- ✓ Pasilitasi Penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau naskah akademik
- ✓ Pembahasan Kebijakan Anggaran
- ✓ Pembahasan KUA dan PPAS
- ✓ Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- ✓ Pembahasan APBD Perubahan
- ✓ Pembahasan Laporan Semester
- ✓ Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD
- ✓ Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
- ✓ Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
- ✓ Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
- ✓ Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat

- ✓ Pengawasan Urusan pemerintahan Bidang Perekonomian

G. Peningkatan Kapasitas DPRD

- ✓ Pendalaman Tugas DPRD
- ✓ Publikasi dan Dokumentasi Dewan
- ✓ Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli

H. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

- ✓ Pelaksanaan Reses

I. Fasilitasi Tugas DPRD

- ✓ Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
- ✓ Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
- ✓ Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

Tabel 3.2 (T-C.33)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluara n Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp).			
						Program	Keluara n Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target				
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
4	2				SEKRETARIAT DPRD												
4	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH												
4	2	1	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
4	2	1	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai AKIP PD	Jumlah Dokume nt	Tersedia nya dokume nt	Sekretari at DPRD		24 Dokum en	24 Dokum en	13.539.100	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Khusus	Nilai AKIP PD	70 Point	91.285.100
4	2	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD	Nilai AKIP PD	Jumlah Dokume nt Evaluasi Kinerja	Tersedia nya dokume nt	Sekretari at DPRD		Dokum en	Dokum en	17.444.200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Khusus	Nilai AKIP PD	70 Point	7.625.000

4	2	1	2		Administrasi Keuangan													
4	2	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai AKIP PD	Jumlah Pembayaran Gaji ASN	Tersedia nya 12 Bulan Gaji Pegawai	Sekretari at DPRD				6.835.062.287	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus		Nilai AKIP PD	70 Point	6.835.544.097
4	2	1	2	2	Koordinasi dan Penyusunan Keuanganan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Nilai AKIP PD	Jumlah Dokumen	Tersedia nya dokumen Lporan Keuangan	Sekretari at DPRD	Point	Dokumen	Laporan	197.347.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus		Nilai AKIP PD	70 Point	56.258.000

					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													
4	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Nilai AKIP PD	Jumlah Laporan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	4	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus		Nilai AKIP PD	70 Point	72.000.000
4	2	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai AKIP PD	Jumlah Laporan	Tersedia nya dokumen anggaran	Sekretari at dprd	Point	Laporan	Laporan	486.652.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus		Nilai AKIP PD	70 Point	350.000.000
4	2	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai AKIP PD	Jumlah Laporan	Tersedia nya dokumen Kegiatan	Sekretari at dprd	70 Point	1 Laporan	Laporan	300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus		Nilai AKIP PD	70 Point	

Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
4	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Sekretariat dprd				35.832.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus	Nilai AKIP PD	70 Point	50.600.800
4	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Waktu		Sekretariat dprd				1.346.575.350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus	Nilai AKIP PD	70 Point	144.871.300
4	2	1	2.06	4	Penyediaan bahan logistik kantor	Nilai AKIP	Jumlah Laporan Keuangan	Tersedia nya	Sekretariat dprd		Lapora	Laporan	1.672.312.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus			1.790.772.310
4	2	1	2,1	5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Nilai AKIP PD	Jumlah Laporan	Tersedia nya Operasional Perkantoran	Sekretariat dprd		Surat	12 Bulan	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus			145.500.000
4	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai AKIP PD	Laporan Kegiatan	Tersedia nya laporan kegiatan	Sekretariat dprd	70 Point	12 Bulan	12 Bulan	306.140.815,00				-

					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
4	2	1	2,1	6	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Nilai AKIP PD			Sekretariat dprd		12 Bulan	12 Bulan	1.173.296.200					390.999.300
					Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah													
4	2	1	2,1	2	Pemnyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Nilai AKIP PD			Sekretariat dprd	100%		12 Bulan	350.135.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus		Nilai AKIP PD	70 Point	450.024.190
4	2	1	2,1	4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantnor	Nilai AKIP PD			Sekretariat dprd	100%		12 Bulan	2.790.455.304	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus		Nilai AKIP PD	70 Point	2.995.862.904
					Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah													
4	2	1	2,1	1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Nilai AKIP PD	Pemeliharaan kendaraan Dinas	Tersedianya Operasional Perkantoran	Sekretariat dprd	100%	14 Jenis	12 Bulan	232.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus		Nilai AK	70 Point	290.900.000

4	2	1	2,1	6	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Nilai AKIP PD	Jumlah		Sekretariat dprd	100%		12 Bulan	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Nilai AKIP PD	70 Point	254.550.000
4	2	1	2,1	11	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Nilai AKIP PD	Jumlah		Sekretariat dprd	100%		12 Bulan	550.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Nilai AKIP PD	70 Point	350.000.000
Layanan keuangan dan kesejahtraan DPRD																		
4	2	1	2,2	1	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD				Sekretariat dprd		Gaji dan tunjangan gaji DPRD	12 Bulan	31.196.605.618	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Nilai AKIP PD	70 Point	33.410.007.080
4	2	1	2	2	Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD	Nilai AKIP PD	Tersedia nya Pakaian Dinas DPRD	Laporan	Sekretariat dprd	100%	Kegiatan	12 Bulan	450.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Nilai AKIP PD	70 Point	155.000.000
4	2	1	2	3	Pelaksanaan medical check up DPRD	Nilai AKIP PD		Tersedia nya Layanan kesehatan DPRD	Sekretariat dprd	70 Point	45 anggota DPRD	12 Bulan		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus		Nilai AKIP PD	70 Point	60.000.000
Pembahasan kebijakan anggaran																		
4	2	1	2	1	Pembahasan KUA dan PPAS	Pasilitasi Rapat DPRD	Dokumen APBD		Sekretariat dprd	100%	Kegiatan	12 Bulan	248.800.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Nilai AKIP PD	70 Point	232.432.750

4	2	1	2	2	Pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS		Dokumen APBD	Laporan Kegiatan	Sekretariat dprd	100%	Kegiatan	12 Bulan	238.981.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus		Nilai AK	70 Point	247.351.750
4	2	1	2	4	Pembahasan APBD perubahan		Dokumen APBD		Sekretariat dprd	100%	Kegiatan	12 Bulan	453.248.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus		Nilai AK	70 Point	134.895.750
4	2	1	2	5	Pembahasan laporan semester	Fasilitas Rapat-Rapat DPRD	Laporan Kegiatan	Dokumen	Sekretariat dprd	100%	Dokumen	12 Bulan	252.397.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Nilai AK	70 Point	446.320.750
	2	1	2	6	Pembahasan penanggung jawaban APBD		Jumlah Laporan Kegiatan	Dokumen	Sekretariat dprd	100%		12 Bulan	229.925.200	Dana Transfer Umum-Dana		Nilai AK	70 Point	251.148.000
					Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan penyelenggaraan pemerintahan													
4	2	1	2	38	Pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum	Nilai AKIP PD	Jumlah Rehabilitasi Rumah Gedung Kantor	Tersedia nya Operasional Perkantoran		70 Point	3 Paket	12 Bulan	203.971.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus		Nilai AK	70 Point	121.505.000
4	2	1	2	10	Pengawasan urusan pemerintahan bidang insfaraktuktur		Jumlah Kegiatan		Sekretariat dprd	100%	Kegiatan	12 Bulan	121.505.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus		Nilai AK	70 Point	203.971.500

4	2	1	2	11	Pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahtraan rakyat	Fasilitas i Rapat-Rapat DPRD	Jumlah Kegiatan		Sekretariat dprd	100%	Kegiatan	12 Bulan	121.505.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus		Nilai AK	70 Point	203.971.500
4	2	2	2	1	Pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian		Jumlah Kegiatan		Sekretariat dprd	100%	Dokume	1 Tahun	121.505.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus				203.971.500
Peningkatan kapasitas DPRD																		
4	2	2	2	6	Pendalaman tugas DPRD	Fasilitas i Rapat-Rapat DPRD		Bintek Anggota DPRD	Sekretariat dprd	100%	Dokume	1 Tahun	1.812.390.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus		Nilai AKIP PD		2.131.469.500
4	2	1	2	1	Publikasi dan dokumentasi dewan	Fasilitas i Rapat-Rapat DPRD	Jumlah Dokument	Publikasi Kegiatan	Sekretariat dprd	100%	Dokume	1 Tahun	1.175.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus		Nilai AKIP PD		852.929.300
4	2	1	2	3	Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli				Sekretariat dprd	100%		1 Tahun	366.456.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus				495.816.000
4	2	3	2	1	Penyediaan tenaga ahlin fraksi	Fasilitas i RapatRapat DPRD	Jumlah Dokument		Sekretariat dprd		7 orang	Laporan	425.103.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus				420.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta tahun 2023 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023. Renja ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

Rencana Kerja merupakan acuan setiap Perangkat Daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Rencana kerja program dan kegiatan serta pagu indikatif Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran		
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Sekretariat DPRD					86,825,403,531	82,695,320,132	95.24
	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	B	B	53,147,831,581	49,875,443,287	93.84
Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran			%	90.00	57.44				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	100	228,914,800	214,599,636	93.75	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Tersusunnya Renja Perangkat daerah	Dokumen	2	2	81,289,800	74,488,260	91.63	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Tersedianya dokumen RKA kegiatan	Dokumen	1	1	140,000,000	132,486,376		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	1	1	7,625,000	7,625,000	100.00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persen	100	100	6,928,652,397	5,818,951,446	83.98	

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	14	6,835,544,097	5,726,688,731	83.78
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan	Dokumen	1	1	93,108,300	92,262,715	99.09
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase	100	100	557,810,000	448,958,224	80.49
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya, tersedianya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu, tersedianya pengadaan pakaian korpri	Bulan	12	12	172,810,000	71,550,000	41.40
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan Formal	Persen	100%	100%	385,000,000	377,408,224	98.03
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase	100	100	2,376,238,810	2,041,281,000	85.90
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	12	50,600,800	49,856,000	98.53
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya penyediaan Alat Tulis Kantor, tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor	Dokumen	12	12	329,365,700	298,475,000	90.62
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya penyediaan Makanan dan Minuman	Dokumen	12	12	1,850,772,310	1,547,750,000	83.63
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dokumen	12	12	145,500,000	145,200,000	99.79

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase	100	100	1,557,012,309	1,037,919,000	66.66
	Pengadaan Mebel	Tersedianya Fasilitas Kantor	Paket/Unit	2	2	150,000,000	99,700,000	66.47
	Pengadaaan Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Tersedianya sarana gedung kantor	Presentase			851,013,009	548,464,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor	Bulan	12	12	555,999,300	389,755,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase	100	100	3,458,469,594	2,882,913,651	83.36
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Bulan	12	12	12,000,000	12,000,000	100.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12	450,024,190	423,272,815	94.06
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa Administrasi keuangan, tersedianya jasa kebersihan kantor	Bulan	12	12	2,996,445,404	2,447,640,836	81.68
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase	100	100	1,226,845,000	1,190,249,146	97.02
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/ Operasional, tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional	Bulan	12	12	330,895,000	296,431,146	89.58

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksana pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor, terlaksana pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Bulan	12	12	345,950,000	345,260,000	99.80
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor, terlaksananya pengadaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor DPRD	Bulan	12	12	200,000,000	199,270,000	99.64
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor, terlaksananya pengadaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor DPRD	Bulan	12	12	350,000,000	349,288,000	99.80
	layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Prosentase	100	100	36,074,477,671	35,524,629,554	98.48
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tersedianya Gaji dan Tunjangan DPRD	Bulan	14	14	35,859,477,671	35,310,089,554	98.47
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Terlaksananya Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Persen	100	100	155,000,000	154,690,000	99.80
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Persen Orang	100 45	100 45	60,000,000	59,850,000	99.75
	Layanan Administrasi DPRD					739,411,000	715,941,630	96.83
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Tersedianya Fasilitasi Rapat DPRD	Bulan	12	12	739,411,000	715,941,630	96.83
Meningkatnya Penerapan Reformasi	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase pemenuhan referensi perundang-undangan	Persen	100.00	38.02	33,677,571,950	32,819,876,845	97.45

Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Perentase fasilitasi kegiatan rapat DPRD	Persen	100.00	38.02			
		Persentase penyusunan risalah rapat	Persen	100.00	38.02			
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Persentase	100.00	100.00	8,012,071,000	7,809,047,279	97.47
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Tersedianya penyusunan dan pembahasan Program dan pembentukan Peraturan Daerah, tersedianya Rapat-rapat DPRD	Dokumen Bulan	2 10	2 10	756,320,000	695,374,056	91.94
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Tersedianya pembahasan Rancangan Perda	Dokumen Bulan	21 10	21 10	6,500,627,000	6,408,394,623	98.58
	Penyelenggaraan kajian Perundang-undangan	Tersedianya penyelenggaraan kajian perundang undangan	Dokumen Bulan	12 12	12 12	245,880,000	203,204,500	82.64
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Tersusunnya Dokumen Naskah Akademik	Dokumen Bulan	6 12	6 12	509,244,000	502,074,100	98.59
	Pembahasan Kebijakan Anggaran		Persentase	100.00	100.00	1,382,490,250	1,257,701,893	90.97
	Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksanannya pembahasan KUA dan PPAS	Kegiatan	6	6	205,552,750	196,813,650	95.75
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS Perubahan	Kegiatan	1	1	206,552,750	186,184,832	90.14
	Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya pembahasan APBD Perubahan	Kegiatan	1	1	218,671,250	136,440,709	62.40
	Pembahasan Laporan Semester	Terlaksananya Pembahasan Laporan Semesteran	Kegiatan	1	1	244,776,750	239,021,777	97.65
	Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD	Terlaksananya Pembahasan Pertanggung jawaban DPRD	Kegiatan	1	1	202,041,000	194,345,175	96.19

Pembahasan APBD	terlaksana Pembahasan APBD	Kegiatan	1.00	1.00	304,895,750	304,895,750	100.00
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Persentase	100.00	100.00	502,352,000	349,064,500	69.49
Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Tersedianya pengawasan urusan pemerintah bidang pemerintahan dan hukum	Bulan	12	12	140,063,000	102,016,500	72.84
Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Infrastruktur	Tersedianya pengawasan urusan pemerintah bidang infrastruktur	Bulan	12	12	121,988,000	87,926,500	72.08
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Tersedianya pengawasan urusan pemerintah bidang kesejahteraan rakyat	Bulan	12	12	122,363,000	83,285,000	68.06
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Tersedianya pengawasan urusan pemerintah bidang perekonomian	Bulan	12	12	117,938,000	75,836,500	64.30
Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase	100.00	100.00	4,859,661,800	4,565,373,085	93.94
Pendalaman Tugas DPRD	Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Persen	100	100	2,865,039,500	2,732,931,000	95.39
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Tersedianya Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Bulan	12	12	1,078,806,300	996,358,300	92.36
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Persen	100	100	495,816,000	416,083,785	83.92
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Persen	100	100	420,000,000	420,000,000	100.00
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Persentase	100.00	100.00	7,287,551,000	7,267,724,846	99.73
Pelaksanaan Reses	Tersedianya pelaksanaan kegiatan Reses Anggota DPRD	Kegiatan Dapil	2 6	2 6	7,287,551,000	7,267,724,846	99.73
Fasilitasi Tugas DPRD		Persentase	100.00	100.00	11,633,445,900	11,570,965,242	99.46

	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Tersedianya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Bulan	12	12	7,526,850,300	7,516,076,500	99.86
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Badan Musyawarah	Tersedianya Undangan DPRD	Bulan	12	12	1,248,607,300	1,224,449,742	98.07
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Tersedianya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Bulan	12	12	2,857,988,300	2,830,439,000	99.04

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Tahun 2021 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan pada Setiap Semester (Semester I dan Semester II) sebagai bahan penyusunan KUPA-PPAS/R-APBDP Tahun 2022 yang disusun berdasarkan Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

Renja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan melalui perencanaan kegiatan yang berkualitas. Renja ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sekretariat DPRD Kota purwakarta pada tahun 2024 dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi.

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 bertujuan untuk meningkatkan dan mencapai perencanaan kegiatan berkualitas. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran kinerja yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Renja Sekretariat DPRD tahun 2024, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar Bagian mengingat pewaktuan serta pencapaian indikator kinerja.
2. Renja Sekretariat DPRD tahun 2024, menjadi dasar bagi penyusunan perubahan RKAP/DPPA Sekretariat DPRD serta pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya.

Rencana Kerja tahun 2024 merupakan refleksi dari asumsi ketercapaian indikator kinerja dengan memperhatikan evaluasi

penganggaran tahun sebelumnya, guna mengantisipasi hal-hal yang perlu dilaksanakan dalam mewujudkan konsistensi perencanaan dan penganggaran. Dengan demikian, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, dapat diketahui asumsi-asumsi pencapaian keberhasilan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana yang telah tertuang dalam Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2024-2026.

Akhir kata, semoga Rancangan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi.

